



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN *Tahun 2023*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.



Jakarta, 20 Desember 2023

Ketua

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

REVIU SHEET
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Reviu menyesuaikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Keterangan
1.	Perubahan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah menyesuaikan dengan format RKT Lampiran SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.	Dikoreksi
2.	Perubahan indikator kinerja tambahan	Dikoreksi

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Jakarta, 20 Desember 2023

Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
 NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1222 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Reviu SAKIP.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pertama

: Membentuk Tim Penyusun Reviu SAKIP Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua.....

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2023

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1222/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

**TIM PENYUSUN REVIU SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	:	YUSRAN IBERAHIM, S.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E.

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1327/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PENETAPAN REVIU DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Kesatu : Menetapkan Reviu Dokumen SAKIP sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Desember 2023

Ketua

H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,

Kecamatan Menteng

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

Nomor : W2-TUN/1297/OT.01.1/XII/2023
Perihal : Undangan

18 Desember 2023

- Kepada Yth : 1. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta
2. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional
Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
4. Tim SAKIP/ Reviu SAKIP

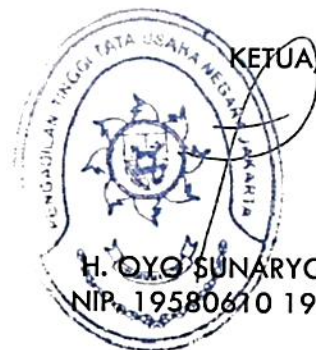
Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak dalam acara Rapat Penetapan Reviu SAKIP,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

Hari/tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Agenda : Pukul 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,
Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 20 Desember 2023
Tanggal :
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Acara : Rapat Penetapan Reviu SAKIP Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2023
Peserta Rapat : *Terlampir dalam absensi*

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional dan Tim SAKIP. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk menetapkan Dokumen SAKIP yang telah di reviu setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi. Berikut adalah hal-hal yang disampaikan dalam rapat penetapan;

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 telah direviu dan ditetapkan pada hari ini tanggal 20 Desember 2023, direviu karena setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi direkomendasikan untuk perbaikan matriks Rencana Kinerja agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SK Sekma 2049 tahun 2022;
2. Reviu Rencana Aksi Tahun 2023 ditetapkan pada hari ini, setelah dilakukannya monitoring, dilakukannya reviu karena matriks tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hari ini ditetapkan matriks Rencana Aksi Tahun 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu SK Sekma 2049 Tahun 2022;

Demikian notulen ini saya buat dan ditanda tangani oleh :

Notulis,

(Sari Meilisna)

NIP. 19900527 202012 2 003

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta,

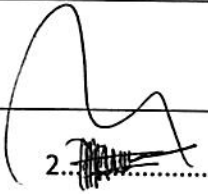
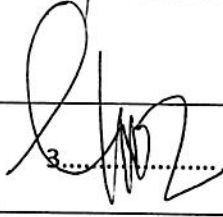

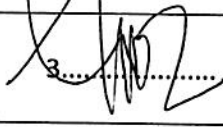

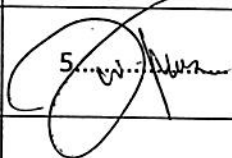
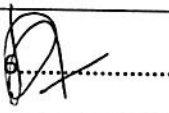

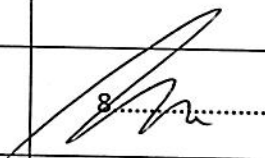
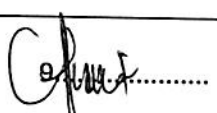
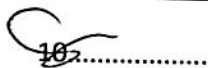
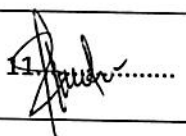


(H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.)
NIP. 19580510 198503 1 001

ABSEN RAPAT
PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Oyo Sunaryo	Cetua	1.....	
2	Aryanto	Hakam Tinggi		2..... 
3	Undang G.	— —	3..... 	
4	Jawo I.	Panmud Perkam		4..... 
5	Wahyu Supriatno	Kabag Umum & Ker	5..... 	
6	Dand N.	PP		6..... 
7	Wahyunesus	Hakam Tinggi	7..... 	
8	A. Ibnu	Kasub TURT		8..... 
9	Nurul Farad'lh	APP	9..... 	
10	Sari Melisna	Pengelola Sistem Inr		10..... 
11	Santi Gusiani	Perencanaan	11..... 	
12				12.....
13			13.....	
14				14.....

DOKUMENTASI RAPAT
RABU, 20 DESEMBER 2023





☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com